

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A . P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan 2, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Adhaper, "Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 1
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah, Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta : Pustaka Nasional, 2003
- Angger Sigit, Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: 2015, Pustaka Yustisia
- Badriyah Harus, S.H. *Op. cit*
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Jimmy Jose Sembiring, *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, Jakarta : Visi Media, 2010
- Kharina. " *Sertipikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia* Juris. Vol 13
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2001
- Maria S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta : Andi Offset, 1982
- Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertipikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung : Mandar Maju, 1991

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Cetakan ke-3, Jakarta : Sinar Grafik, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta : Andi Offset, 1986

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan perubahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

C. Jurnal dan Skripsi

Adhaper, "Tipologi Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya". *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 1. Nomor 2.

Kharina. " *Sertipikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia* Juris. Vol 13

Mardalena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2016. Volume 2. Nomor 1.

Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau". *Riau Law Journal*. Volume 1. Nomor 2.

LAMPIRAN

